

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hamid Ismail al-Anjârî, 1985, *Niṣām al-ḥukm fî al-Islâm*, Dâr al-Qatar al-Fujâ'ah, Qatar
- Abdul Qadim Zallum, 1996, *Nizham al-Hukmi fî al-Islam*, ed. IV, Daar al-Ummah, Beirut, Libanon
- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Cet.I, Jakarta
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta
- C.S.T Kansil, 1994, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Dedy Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Departemen Agama RI., 2002, *Alquran dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra Semarang, Semarang
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan. ke-2 , Balai Pustaka, Jakarta
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung

- H.A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Harun Nasution, 1974, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta
- Hasbi Ash-Shiddiqiy, 2001, *Koleksi Hadis Hukum*, Juz IX, Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Imam Syaukani, 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Komariah Emong Saparadjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Margarito Kamis, 2014, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Setara Press
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mohammad Arifin, 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Mustafa Abdullah. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pres, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bina Cipta, Jakarta,
- Paimin Napitupulu, 2004, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Disertasi, Alumni, Bandung
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta
- Qamaruddin Khan, 2001, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Pustaka, Bandung
- Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Indonesia, Jakarta
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Edisi I, Cet. I, Kencana, Jakarta,
- Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pers, Jakarta

- \_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajwali Pers, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru Bandung
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*". Sinar Grafika, Jakarta
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

KUHAP

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

## **C. Jurnal**

Berdej6, C., & Yuchtman, N. 2013,. *Crime, Punishment, And Politics: An Analysis Of Political Cycles In Criminal Sentencing. Review of Economics and Statistics*, 95(3),

Eko Nuryanto and Gunarto, 2020, *General Election Law Position In The Enforcement Of Criminal Law*, Law Development Journal, Volume 2 No 2, June, (146 - 154)

Handitya, B. 2018,. *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu*. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 02, pp. 348-365)

Ida Hanifah.Faisal.dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasoswal*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Mully, E., Dewi, E., & Husin, B. R, 2018, *Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana "Money Politics" Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah*. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 6(1).

- Ni Made Sritritri, Umar Ma'ruf, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X
- Rusmanto, *Peranan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No. 2 (2019)
- Safitri, E. F, 2019, *Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung)*.
- Sani, T. P, 2019, *Peran Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 (Studi Lapangan: Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)*.
- Saragih, A. D. A., 2017, *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam PEMILU Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Lex et Societatis, 5(3)
- Yeni, Y. 2020. *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019*. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 11(1).

#### D. Internet

- Ahmad Rusyaidi H., Fenomena Konflik Politik Pilkada dan Liberalisasi Politik, sumber:  
<http://www.pdiperjuanganjatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=515>
- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S., 2015, *Match-All party: Pragmatisme Politik Dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik Di Indonesia Pasca Pemilu 2009*. Jurnal Politik, 1(1), 39-74.  
<https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.9>
- Ersan, P., & Erliyana, A., 2018, *Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)*. Jurnal Pakuan Law Review, 4(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1>
- <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diunduh pada tanggal 7 Juli 2020, pukul 21.32 WIB
- [http://www.negarahukum.com/hukum/per\\_kembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html](http://www.negarahukum.com/hukum/per_kembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html)

Sinaga, R. S, 2013,. *Implikasi Distorsi Demokrasi Pada Pilkada terhadap Penguatan Demokrasi Lokal*. Jurnal PERSPEKTIF, 2(1).  
<http://dx.doi.org/10.31289/perspektif.v2i1.107>

Umanailo, M. C. B. 2017, *Mereduksi Multi Partai Untuk Kestabilan Pembangunan Nasional*. DOI: 10.31219/osf.io/e37fp

